

Judul : Komisi IV: jangan cuma kejar viral!
Tanggal : Sabtu, 08 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Duit Bencana Daerah Cair Komisi IV: Jangan Cuma Kejar Viral!



Alex Indra Lukman

DUIT untuk memulihkan daerah terdampak bencana sudah digelontorkan Pemerintah Pusat. Namun, serapannya masih rendah. Kondisi ini membuat Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mempertanyakan keseriusan Pemerintah Daerah mengeksekusi anggaran tersebut.

Alex menyentil kepala daerah agar tidak hanya bersemangat mengejar popularitas di media sosial saat bencana terjadi, tetapi juga serius menggunakan anggaran yang telah diperjuangkan. "Publik melihat, kepala daerah bersama perangkatnya selalu viral di berbagai platform sosial media, setiap kali bencana terjadi. Begitu pun saat berjuang mencari anggaran ke Pemerintah Pusat," ungkap Alex dalam pernyataannya, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, semangat itu harus lebih hebat lagi saat merealisasikan anggaran yang telah diperjuangkan. Kritikan itu disampaikan menyusul banjir yang kembali menenggelamkan Kota Padang pada 3 Agustus 2026 setelah hujan deras selama sekitar 10 jam.

Alex menyebut, salah satu persoalan yang dikeluhkan masyarakat adalah sedimentasi di hilir sungai yang belum tertangani. Lambannya pemu-

lihan tercermin dari serapan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pada 20-22 Juli 2026, terungkap Sumatera Barat (Sumbang) mendapat tambahan TKD Rp 534 miliar, tetapi baru terealisasi sekitar 2,14 persen.

Kota Padang memperoleh Rp 371,85 miliar, namun baru menyerap Rp 45,49 miliar atau 12 persen. Sedangkan Kabupaten Tanah Datar dari alokasi Rp 126,87 miliar baru merealisasikan sekitar 7 persen.

Padahal, tambahan TKD untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbang sebesar Rp 10,65 triliun telah dicairkan 100 persen per 4 Mei 2026. Penyaluran dilakukan tiga tahap tanpa syarat salur.

"Bagi pemerintah pusat, tentunya penyaluran dana rehab rekon untuk wilayah terdampak bencana itu, apakah hanya berupa angka di atas kertas. Ini tercermin pada rendahnya serapan anggaran di tingkat pemerintah daerah," ujar Ketua DPD PDIP Sumbang ini.

Lebih lanjut, Alex menilai, rendahnya serapan salah satunya karena anggaran tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena itu, gubernur, bupati dan wali kota perlu menunjuk pejabat khusus sebagai "komandan" pemulihan bencana. Pejabat tersebut bertugas mengoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi seluruh program pemulihan.

Model ini, lanjutnya, dinilai dapat meniru kebijakan Presiden yang menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala Satgas PRR Pascabencana Sumatera. Satgas tersebut mengawal anggaran Rp 100,166 triliun untuk 12.047 kegiatan pemulihan selama 2026-2028. ■ BYU